**Model *Collaborative Governance* Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Kawasan Pinggir Kali Bekasi**

**Achmad Shovie Adi Samabta Bhakti1, Soleh Suryadi2, R. Taqwaty Firdausijah3**

1,2,3 Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

NPM. 169020001

Email: achmadshovie007@gmail.com

***ABSTRACT***

*One of the things that drives the increase in urban population growth in Indonesia is urbanization and industrialization. This is triggered by the availability of infrastructure in urban areas which tend to be better than in rural areas. The development of such a complex city triggers the emergence of various urban problems, among others, irregular use of spatial planning, zoning of land allocation, the emergence of environmental pollution problems, to business-oriented development so that they do not care about the environment. This study uses a descriptive method with a qualitative approach and data triangulation analysis, the results of the study explain that the city of Bekasi, which is known as an urban area, also has an impact, such as an increase in the amount of waste, both from individuals, households, and other crowded places that have the potential to cause waste to become a source of environmental pollution. Collaboration between stakeholders in environmental management of the Bekasi River Outskirts begins with the mobilization of common principles, shared motivation and joint capacity building as an interaction component of the dynamics of collaboration and is continued by carrying out collaborative actions that form a collaborative governance model. Furthermore, the collaborative governance model approach to environmental management in the Bekasi River Outskirts that has been developed so far shows that it is part of the system context dimension in collaborative governance that begins and moves in multilayers, but has not run effectively; where the elements in question consist of (1) service conditions and resources, (2) legal and policy frameworks, (3) socio economic and cultural characteristics, (4) network characteristics, (5) political and power dynamics, and history conflict. This can be seen from the unfulfilled dimensions of the system context optimally mainly on the elements of service conditions and resources, namely the availability of inadequate and sufficient sources of funds for the management in question, second, on the elements of the legal and policy framework, namely the absence of a legal or regulatory framework that is administratively adequate and binding for all resources, so that the parties are limited to carrying out their roles according to their respective missions.*

***Keywords:*** *Governance, Collaboration, Environmental Management*

**ABSTRAK**

Salah satu hal yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia adalah urbanisasi dan industrialisasi. Hal ini dipicu oleh ketersediaan infrastruktur di perkotaan yang cenderung lebih baik daripada di perdesaan. Perkembangan kota yang sedemikian kompleks memicu munculnya berbagai permasalahan perkotaan antara lain penggunaan tata ruang yang tidak teratur, zonasi peruntukan lahan, munculnya masalah pencemaran lingkungan, hingga pembangunan yang berorientasi bisnis sehingga tidak peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa Kota Bekasi yang dikenal sebagai kawasan perkotaan juga memberikan dampak, seperti peningkatan jumlah sampah, baik dari individu, rumah tangga, maupun tempat keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah menjadi sumber pencemaran lingkungan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan Pinggir Sungai Bekasi diawali dengan mobilisasi prinsip-prinsip bersama, motivasi bersama dan peningkatan kapasitas bersama sebagai komponen interaksi dinamika kolaborasi dan dilanjutkan dengan melakukan aksi kolaboratif yang membentuk model tata kelola kolaboratif. Lebih lanjut, pendekatan model tata kelola kolaboratif pengelolaan lingkungan di Pinggir Sungai Bekasi yang dikembangkan selama ini menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari dimensi konteks sistem dalam tata kelola kolaboratif yang dimulai dan bergerak secara multilayer, namun belum berjalan efektif; dimana unsur-unsur yang dimaksud terdiri dari (1) kondisi layanan dan sumber daya, (2) kerangka hukum dan kebijakan, (3) karakteristik sosial ekonomi dan budaya, (4) karakteristik jaringan, (5) dinamika politik dan kekuasaan, dan konflik sejarah. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya dimensi konteks sistem secara optimal terutama pada unsur kondisi dan sumber daya pelayanan, yaitu ketersediaan sumber dana yang tidak memadai dan mencukupi untuk pengelolaan yang bersangkutan, kedua, pada unsur kerangka hukum dan kebijakan. , yaitu tidak adanya kerangka hukum atau peraturan yang secara administratif memadai dan mengikat semua sumber daya, sehingga para pihak terbatas dalam menjalankan perannya sesuai misinya masing-masing.

**Kata Kunci: Tata Kelola, Kolaborasi, Pengelolaan Lingkungan**

**PENDAHULUAN**

Salah satu hal yang mendorong meningkatnya pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia yakni urbanisasi dan industrialisasi. Hal ini dipicu dengan tersedianya infrastruktur di perkotaan yang cenderung lebih baik dibandingkan di perdesaan. Oleh sebab itu, sebagian besar perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan untuk memperoleh pekerjaan yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk perkotaan yang relatif lebih cepat (Zaenuri, 2016). Tidak jarang pertumbuhan dan perkembangan perkotaan di Indonesia berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa melalui pengarahan dan perencanaan yang baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa mengenai Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan secara efisien dan efektif.

Perkembangan kota yang demikian kompleks memicu timbulnya berbagai permasalahan perkotaan, antara lain, ketidakteraturan penggunan tata ruang, *zoning* alokasi lahan, tidak optimalnya penggunaan tanah, timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat utilitas dan fasilitas, timbulnya masalah pencemaran lingkungan, sampai pada pembangunan yang berorientasi pada bisnis sehingga kurang mempedulikan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan tentang pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Utomo, 2008).

Kota Bekasi yang dikenal sebagai daerah urban menimbulkan pula dampak, seperti peningkatan jumlah limbah sampah baik berasal dari individu, rumah tangga, maupun tempat keramaian lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah buangan yang menjadi sumber pencemaran lingkungan. Lebih lanjut Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada Tahun 2018 mencatat bahwa sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu Kecamatan Bantargebang yang berasal dari berbagai aktifitas penduduk sebanyak 2.415.092 jiwa ini sebagaimana data pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2017 dengan persentase penduduk perkotaan yang terlayani pengangkutan sampahnya sebesar 49,96 persen berdasarkan pedoman penghitungan timbulan sampah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sementara dengan semakin padatnya penduduk, lahan kosong yang tersedia untuk TPA sampah semakin terbatas. Adapun data luas seluruh zona pada TPA Sumur Batu seluas 86.800 m2 yang terbagi dalam 5 zona, yaitu Zona 1, 2, 3, 4, 5A sampai dengan 5 D pada kondisi *overload*. Sampah ditumpuk secara terus menerus, sehingga ketinggian tumpukan sampah telah melebihi batas maksimum keamanan. Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kota Bekasi Tahun 2018, bahwa pada Bulan September 2016, ketinggian tumpukan sampah pada Zona 3 telah mencapai 23 meter. Sedangkan pada Bulan November 2016, di dua Zona aktif 1 dan 2 mencapai 22 meter. Kondisi tersebut telah melebihi batas maksimum ketinggian ideal tumpukan sampah di TPA, yaitu berkisar 1-15 meter ( Sanyoto, 2015).

Selanjutnya, terkait dengan pencemaran air yang ditandai dengan turunnya kualitas air yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Kriteria Mutu Air (KMA) terdapat parameter kualitas air yang kadarnya melampaui ketentuan. Kondisi tercemarnya air permukaan ditunjukkan dari Status Mutu Air (SMA) yang dinyatakan dalam tercemar ringan, sedang dan berat. Penyebab pencemaran air permukaan, yaitu adanya pembuangan limbah domestik, industri dan pertanian. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Bekasi pada Tahun 2017 diperoleh data, bahwa dari 50 titik pantau kualitasnyatidak memenuhi persyaratan KMA Kelas II, yakni peruntukkan sebagai prasarana/sarana rekreasi, budidaya ikan air tawar, peternakan dan mengairi pertanaman dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Perkembangan Kota Bekasi yang relatif cepat sebagaimana dijelaskan sebelumnya memicu munculnya wilayah-wilayah pemukiman kumuh di Kota Bekasi. Yakni, penduduk dengan tingkat penghasilan mencukupi atau bahkan cenderung kurang, sekalipun bertempat tinggal dengan biaya murah dan dengan kualitas bangunan seadanya tentu menjadi pilihan. Kawasan kumuh pun bermunculan terutama di Kawasan Pinggir Kali Bekasi yang mengakibatkan hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai dampak dari padatnya penduduk yang tinggal di kawasan tersebut. Struktur bangunannya pun menggunakan bahan-bahan semi permanen dan tata kawasan yang tidak teratur. Hal ini merupakan gambaran terjadinya kawasan pemukiman yang tidak ideal untuk ditempati dan cerminan degradasi sosial sebahagian warga Kota Bekasi akibat pembangunan yang sporadis dan tidak jarang mengabaikan timbulnya dampak lingkungan, seperti alih fungsi lahan, timbulnya sampah liar/limbah, penurunan kualitas air dan tanah, polusi udara dan terganggunya ekosistem lainnya.

Kenyataan ini terjadi pula di salah satu wilayah Kota Bekasi dikenal dengan sebutan Kawasan Pinggir Kali Bekasi yang terletak tepat di pinggiran aliran Kali Bekasi sebagai salah satu gambaran permasalahan perkotaan. Penurunan kualitas lingkungan yang terjadi selama ini merupakan indikator buruknya kondisi Kawasan Pinggir Kali Bekasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di sepanjang Kawasan Pinggir Kali Bekasi yang belum optimal. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pengelolaan yang lebih baik. Langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih, terutama lokasi yang mengalami pencemaran dan kerusakan. Kebijakan pemulihan lingkungan hidup pun diperintahkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang mengatur peran dan tanggung jawab *stakeholder* dalam pemulihan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 54 menyebutkan, bahwa pihak pencemar wajib melakukan pemulihan, yang mana proses dan tahapan yang harus dilakukan mencakup penghentian sumber pencemaran, pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi (Thoha & Miftah, 2015).

Salah satu langkah penting yang dilakukan guna memastikan koherensi kebijakan dengan permasalahan dimaksud, yaitu pelibatan *stakeholder* yang diyakini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Sejauh ini, beragam *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan Kawasan Pinggir Kali Bekasi, antara lain: mulai dari pemerintah yang diwakili oleh kementerian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi dan pemerintah kota (perangkat daerah), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau forum masyarakat lainnya, pelaku usaha, perguruan tinggi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masing-masing *stakeholder* memiliki kepentingan dan peran yang berbeda dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Sejauh ini dengan adanya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah setempat dan pelibatan *stakeholder* dipandang berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi.

Kunci keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi adalah pengelolaan yang utuh dan terintegrasi dari berbagai kepentingan sektoral dan kepentingan kelompok melalui usaha kolektif. Meskipun demikian, aksi kolektif dari berbagai *stakeholder* perlu diantisipasi. Pelibatan *stakeholder* secara luas dapat menciptakan tantangan-tantangan baru. Hal ini dapat terjadi karena adanya kompleksitas persoalan dan keragaman kepentingan (persepsi, cara pandang, otoritas, dan kepentingan) antar*stakeholder* yang terlibat. Untuk itu, guna mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi, perlu dibangun suatu mekanisme interaksi yang dapat meminimalisasi dampak negatif dari aksi kolektif *stakeholder*. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari aksi kolektif ini adalah dengan menerapkan sistem *governance* yang dapat menyatukan kepentingan melalui konsensus bersama, sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan dari aksi kolektif.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, peneliti juga ingin mengkaji sebuah fenomena yang membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Adapun penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, akan tetapi penelitian ini menggunakan metode post positivisme dengan kondisi obyek yang natural, menempatkan peneliti sebagai alat atau instrument kecil, serta teknik pengumpulan data bersifat gabungan (Strauss & Corbin 2013). Sehubungan dengan hal dimaksud, maka penelitian kualitatif sangat cocok dipakai mengingat dalam penelitian ini lebih banyak menggambarkan fenomena kolaborasi pemangku kepentingan, peran organisasi (komunitas), pergerakan sosial atau hubungan timbal balik.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan yang berasal dari para informan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan model *collaborative governance* pengelolaan lingkungan hidup kawasan pinggir Kali Bekasi. Pencarian data dipusatkan pada informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian ini mengenai pemahaman mereka atas *collaborative governance* pengelolaan lingkungan hidup kawasan pinggir Kali Bekasi. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumentasi pada Kawasan pinggir Kali Bekasi tepatnya di Hutan Bambu Kelurahan Margahayu, Rumah Perahu di Kelurahan Margajaya dan di Kelurahan Pekayonjaya dengan sebutan Stasiun Antara *Charger*, semua terletak di Kawasan Pinggir Kali Bekasi dan instansi terkait, jurnal penelitian, majalah, surat kabar dan buku teks yang relevan dengan model *collaborative governanve* pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Relasi *Antarstakeholder* dan Dampak Relasi TersebutTerhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi**

Pada konteks model *collaborative governance* pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi ini, peneliti akan membahas berdasarkan kajian teori, analisis, observasi, dan wawancara serta studi dokumentasi hasil penelitian. Peneliti melakukan pembahasan dengan mengacu pada kerangka teori model *collaborative governance* yang digagas oleh Emerson, et al (2011), meliputi dimensi *system context*, *drivers* yang merupakan bagian dari konsep *collaborative governance regime* *(CGR)* dan dinamika kolaborasi. *System context* yang ada dalam *collaborative governance* akan berjalan ketika terdapat komponen-komponen yang menjawab mengapa perlu adanya *collaborative governance* dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Komponen-komponen tersebut yang akan mendorong proses dan perkembangan *collaborative governance,* sebagaimana hail penemuan di lapangan bahwa, sampai sejauh ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi sudah melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat mengenai kerjasama pengelolaan Kawasan Pinggir Kali Bekasi, dalam hal ini, kami melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor karena pada dasarnya Pinggir Kali Bekasi ini merupakan aliran dua sungai yaitu Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas yang berada di Kabupaten Bogor.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi bahwa, kebijakan mengenai pengelolaan kawasan pinggir Kali Bekasi pada dasarnya merupakan perencanaan dari Propinsi Jawa Barat, kami dari Pemerintah Kota Bekasi hanya melakukan pembinaan, monitoring melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yang mengemban kebijakan mengenai program di daerah Kawasan Pinggir Kali Bekasi adalah Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat sedangkan untuk hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Dinas Lingkungan Kota Bekasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi adalah berkaitan dengan anggaran yang terbatas dan tugas pokok dan fungsi dari setiap instansi yang masuk ke dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi menyebutkan, bahwa untuk pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi ini, meskipun banyak instansi yang terlibat, tetapi mereka hanya melaksanakan programnya sendiri-sendiri, walaupun tidak sampai ada konflik, tetapi dengan tidak ada peraturan walikota yang mengikat, sehingga dalam hal ini kolaborasi yang terjadi diantara stakeholders hanya sebatas kepentingan dari masing-masing instansi saja dengan anggaran yang tidak maksimal (Tasdyanto, 2010).

Dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi ini melibatkan banyak pihak, tetapi kita tidak ada kerangka hukum atau peraturan yang secara administrasi mengikat kita sebagai sumber daya pengelola untuk dapat bekerja secara optimal, semua instansi atau pihak yang terlibat mereka menjalankan misinya sendiri guna melakukan pengelolaan kawasan pinggir kali sesuai dengan tupoksinya, pada akhirnya masyarakat tahunya Dinas Lingkungan Hidup saja, padahal untuk perbaikan infrastruktur kita melibatkan Dinas PU, kemudian untuk menarik wisatawan kita bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, apalagi kalau berhadapan dengan pihak swasta seperti CSR atau relawan yang berasal dari propinsi, CSR sendiri disini hanya memberikan bantuan berupa bangunan bukan berupa dana dalam bentuk uang. Diperlukan pengelolaan kawasan kali yang tersusun secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring dan evalausi, sehingga pengelolaan Kawasan Pinggir Kali itu terus berkelanjutan. Walaupun untuk sementara ini, baru Hutan Bambu ini yang sudah dijadikan sebagai tempat wisata, kami mengharapkan kedepannya untuk wilayah lain dapat dijadikan sebagai tempat wisata juga, sehingga ada pemberdayaan masyarakat di daerah sekitar.



***Gambar 1***

***Bantuan dari Anggota DPR-RI dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi***

***Sumber: Dokumentasi/Foto diolah oleh Peneliti, 2021***

Hasil penelitian mengenai model *collaborative governance* pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Pinggir Kali Bekasi ini menunjukkan, bahwa adanya sinergitas pembangunan semua program Pemerintah Kota Bekasi dan telah sejalan sesuai dengan pembangunan kawasan Kota Bekasi yang substansinya memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Bukan hanya hadirnya pemerintah saja, keterlibatan berbagai sumber daya yang berkualitas, berkarakteristik dan mampu menjadi agen pelaksana yang baik dalam pelayanan masyarakat. Perlu pengaturan secara administratif dari Pemerintah Kota Bekasi yang berlaku bagi para *stakeholder* atau pemangku kepentingan atas pengelolaan lingungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi dengan mengedepankan berbagai komunikasi antarorganisasi, sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan bergeraknya lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang sangat dinamis, yaitu potret kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, budaya dan keragaman yang terbentuk dalam lingkungan yang menaungi. Instrumen ini perlu dikembangkan untuk merekatkan setiap aktor/*stakeholder* dalam seluruh level hierarki kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Budaya ini perlu dimiliki oleh seluruh aktor/*stakeholder*, baik Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, atau dunia usaha. Budaya kolaboratif yang sudah tumbuh di satu organisasi dan/atau aktor, tidak akan berjalan baik apabila tidak didukung oleh budaya kolaboratif di organisasi dan/atau aktor mitranya. Dengan adanya budaya kolaboratif yang menyeluruh, maka seluruh aktor/*stakeholder* akan berjuang bersama untuk menyelesaikan suatu persoalan. Menurut Cameron dan Quinn (2011) menempatkan organisasi di sebuah kontinum yang memiliki 4 (empat) nilai, yaitu fleksibilitas, stabilitas, diferensiasi, dan integrasi.

Terdapat empat tipe budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai tersebut, Pertama adalah budaya hierarki yang ditandai dengan beberapa ciri, yaitu garis yang jelas dalam pengambilan keputusan, aturan dan prosedur baku, mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Kedua adalah budaya pasar, yang mana konsumen bebas untuk memilih, sehingga organisasi terpacu untuk berkompetisi. Ketiga adalah budaya *adhocracy*, yang ditandai dengan sifat dinamis, kewirausahaan, dan lingkungan yang kreatif. Keempat adalah budaya klan, yang diidentikkan dengan budaya kolaboratif. Budaya klan mencapai tujuan organisasi melalui kerja sama tim dan pengembangan SDM bersama. Budaya ini bertujuan untuk memberdayakan karyawan, memfasilitasi partisipasi, komitmen, dan loyalitas. Budaya kolaboratif ini penting untuk merekatkan seluruh aktor/*stakeholder* yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi (Suswanto & Edy**,** 2018).

Belum terbentuk budaya kolaboratif di antara para *stakeholder* yang berkepentingan pada pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Budaya hierarki masih menjadi budaya dominan di level organisasional. Budaya hierarki ditunjukkan dengan adanya aturan dan prosedur yang baku. Sejumlah informan menyatakan, bahwa instansi pemerintah masih melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa adanya keinginan untuk berkolaborasi. Lebih lanjut, sejumlah informan menyatakan, bahwa mereka membutuhkan suatu landasan hukum untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Hal ini menunjukkan adanya budaya hierarki di internal pemerintah. Instansi pemerintah hanya berpatokan pada peraturan yang berlaku dan minim adanya keinginan untuk berkolaborasi. Jika hanya berpedoman pada peraturan, mereka cenderung lemah untuk melakukan inisiatif dan inovasi. Budaya hierarki ini merupakan penghambat kerja kolaborasi. Banyak organisasi gagal mengembangkan budaya kolaboratif, karena mereka terstruktur dan dikelola berdasarkan aturan formal dan norma tak tertulis yang terlalu berlebihan. Sering kali budaya hierarki ini tertanam begitu kuat, sehingga organisasi tidak menyadari bahwa hal itu dapat menjadi penghalang potensial untuk berkolaborasi dengan organisasi lain.

Selain di internal pemerintah, budaya kolaboratif juga belum terbentuk secara baik di antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Hal itu diungkapkan oleh Ketua FMPKB yang menyatakan, bahwa masing-masing aktor/*stakeholder* memiliki konsep masing-masing dalam pengelolaan Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Selain itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengungkapkan lemahnya budaya kolaboratif berbagai instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Tiap aktor/*stakeholder* mementingkan konsepnya masing-masing dan tidak mendiskusikan konsep tersebut dengan aktor/*stakeholder* lainnya. Padahal, Menurut Himmelman (1996), budaya kolaboratif ditandai dengan adanya pengambilan keputusan bersama dan rasa kepemilikan terhadap proses kolaborasi. Menurut O’Flynn dan Wanna dalam Erwan (2015) yang menyatakan, bahwa pada *collaborative governance,* pemerintah bekerjasama melalui sektor *privat* dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kriteria dalam *collaborative governance* mengimplikasikan peran aktor non publik untuk memiliki responsibilitas pada keluaran kebijakan. Oleh karena itu, interaksi di dalamnya mengharuskan aktor-aktor tersebut secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan dalam bentuk *two-way flows and influence.*

**Model *Collaborative Governance* Yang Efektif Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pinggir Kali Bekasi**

Proses *collaborative governance* yang peneliti pilih untuk melakukan pendekatan penelitian, yakni teori proses kolaborasi yang digagas oleh Emerson et.al (2011), karena melihat komponen yang komprehensif dan tepat digunakan dalam menjawab permasalahan. Teori proses kolaborasi atau *Collaborative Governance Regime* (*CGR*) menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama, serta adaptasi terhadap dampak sementara. Penelitian menggunakan berbagai komponen dalam *CGR* untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya sebagai berikut, (1) dinamika kolaborasi (2) tindakan-tindakan kolaborasi, dan (3) dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi (Emerson et.al 2011). Fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi, tersebut, antara lain, penggerakan prinsip bersama (*principal engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

 Model *collaboration governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi ini, yakni penggerakan prinsip bersama (*principled engagement*)merupakan hal yang terjadi terus-menerus dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti: dialog tatap-muka antara aktor-aktor yangberkepentingan, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk mengerakkan prinsip bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup kawasan pinggir Kali Bekasi ini, baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, berbagai perangkat daerah yang terlibat di Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta dan masyarakat. Untuk mengelola kawasan pinggir Kali Bekasi ini tidak terlepas dari peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, karena berhubungan dengan kawasan pinggir Kali Bekasi dan Kabupaten Bogor .

Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini. Karakteristik masing-masing aktor, merupakan elemen kunci yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berkembang, penambahan aktor pun dimungkinkan. Kemudian barulah kegiatan penggerakan prinsip bersama terwujud, yang dapat dijelaskan dalam 3 (tiga) elemen sebagai berikut, Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan baik pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi. Analisis kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi. Pengungkapan pada level ini menekankan individu dan aktor, utamanya guna membangun pembentukan “*shared-meaning*” atau pengertian bersama secara terus-menerus. Terbentuknya hal ini akan mempengaruhi proses diskusi bersama, yang di dalamnya terdapat deliberasi sebagai “*hall-mark of sucessful engagement*” atau tanda utama dari suksenya penggerakan bersama. Kemudian penekanan tidak hanya pada terbentuknya deliberasi (Imran, 2013).

Namun lebih kepada bagaimana kualitas deliberasi, karena kolaborasi seringkali terjadi perbedaan pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang muncul setiap saat. Membangun deliberasi yang berkualitas dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggiran Kali Bekasi ini memerlukan keahlian advokasi, tidak harus pada semua individu, namun sebagian saja sudah cukup. Advokasi ini bersifat internal, artinya untuk mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi yang menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif. Beberapa hal analisis deliberasi yang telah diuraikan, secara implisit berusaha untuk mendapat jawaban mengenai keberanian para aktor untuk bertindak leluasa dalam kolaborasi. Ada atau tidaknya tekanan dari pihak pemerintah, sehingga membatasi tindakan kolaborasi atau ada paksaan harus berbuat demikian.

Adanya proses demokrasi delibratif, sehingga mampu membuat kolaborasi menjadi wadah untuk mengembangkan inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yaitu apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor tidak takut akan bertindak kreatif, karena tidak ada tekanan untuk harus bertindak sesuai yang diperintahkan. Selanjutnya determinasi serangkaian determinasi, yaitu tindakan penetapan maksud dan tujuan yang diinginkan, serta dibedakan menjadi primer dan substantif. Determinasi primer, beberapa keputusan prosedural (misalnya: *agenda setting* kolaborasi, menjadwalkan diskusi, membentuk kelompok atau jadwal kerja). Determinasi substantif, hasil produk kolaborasi (misalnya: pencapaian kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi). Dalam kolaborasi yang sedang berlangsung sekarang ini menurut pengamatan peneliti, lebih banyak determinasi subsantif yang dibuat secara terus-menerus, karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan melihat dari praktisnya, determinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode fundamental dalam pembentukan determinasi bersama. Kesimpulannya, penggerakan prinsip bersama dibentuk dan dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dalam pengelolaan lingkungan hidup kawasan pinggir Kali Bekasi.

Selain itu, adanya sikap optimis akan tercapainya tujuan kolaborasi pengekolaan lingkungan hidup kawasan pinggir Kali Bekasi, dan semangat untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan aktor lain juga membentuk komitmen. Adanya hasil baik sementara dari kolaborasi atau *small-wins* dan insentif yang baik juga seringkali mempengaruhi perubahan komitmen aktor kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Adanya interaksi yang berkualitas membentuk kepercayaan bersama dan pengertian bersama, sehingga tercipta pengakuan legitimasi internal, yang mempengaruhi komitmen bersama. Keempat hal tersebut diharapkan dapat berkembang dan saling mempengaruhi, sehingga menciptakan motivasi bersama tetap berlangsung. Hal lain terselenggaranya *collaborative governance* pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi berdasarkan hasil penelitian, terutama pada komponen *share motivation* atau modal sosial ini bahwa terdapat elemen budaya organisasi institusi yang permisif terhadap pelibatan berbagai aktor sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing ditunjukkan pada proses kolaborasi. Elemen budaya organisasi institusi pada komponen *share motivation* proses dinamika kolaborasi ini melengkapi elemen yang telah ada sebagaimana gagasan Emersen et.al (2011).

Seringkali beberapa aktor kolaborasi dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi, pihak swasta, masyarakat dan Forum Masyarakat Peduli Kali Bekasi (FMPKB) tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak bersama, karena adanya perbedaan dan ketimpangan kekuatan. Oleh karena itu, definisi dari kapasitas adalah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang memadahi dari aktor. Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting, meliputi prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Elemen-elemen tersebut harus memadai dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama seringkali dipandang sebagai hasil dari interaksi penggerakan prinsip bersama dan motivasi bersama. Namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan penggerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif (Hiplunudin & Agus, 2017).

Berbagai prosedur dan protokol, serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar actor dalam pengekolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi. Sedangkan dimensi-dimensi dari kesepakatan bersama adalah aturan-aturan umum (*ground rules*), protokol-protokol dalam kegiatan (*operating protocol*), peraturan untuk membuat keputusan (*decision rules*), dan sebagainya yang mungkin dapat terbentuk. Seringkali kesepakatan yang ada dalam kolaborasi awalnya adalah informal, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan formalitas, seperti adanya pembentukan perundangan atau legal formal yang menjadi payung hukum berkolaborasi. Untuk kolaborasi yang lebih besar, lebih kompleks, dan berdurasi panjang, maka stuktur insitusi kolaborasi harus jelas, dan protokol-protokol untuk administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi yang diperlukan. Sedangkan kesepakatan institusi (*institutional arrangements*), terdapat pada intra-organisasi (bagaimana aktor melakukan *governing* dan memanajemen organisasinya sendiri dalam inisiatif berkolaborasi), serta inter-organisasi (bagaimana grup kolaborasi memanajemen proses, serta bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak luar). Stuktur kolaborasi yang baik adalah fleksibel dan tidak hirarki. Stuktur bersifat jejaring, dengan variasi yang berbeda, biasanya pilihan umum yang digunakan adalah “*self-managing system*” dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah, atau membuat struktur yang benar-benar baru. Walaupun kolaborasi berbentuk fleksibel dan tidak hirarki, namun peraturan masih merupakan hal penting yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi agar efektif, perlu kolaborasi antar*stakeholder*/ pemangku kepentingan yang diwujudkan dalam bentuk formalisasi struktur tata kelola sebagai karakteristik desain kelembagaan pada komponen kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Di dalam dimensi dinamika kolaborasi, meliputi pemerintah (Propinsi Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait), pemerintah lokal (Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan perangkat daerah terkait), akademisi/ lembaga pendidikan (peneliti/ perguruan tinggi), masyarakat/ swasta(lembaga keuangan, forum/ *NGO*), serta komunitas lokal (relawan) pada proses dinamika kolaborasi pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi, sehingga dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimaksud, bahwa *CGR* pada pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi ternyata tidak hanya didorong oleh 4 (empat) pendorong atau *drivers,* yaitu adanya ketidakpastian *(uncertainty),* saling kebergantungan *(interdependence),* insentif konsekuensial *(consequential incentives),* dan kepemimpinan yang *initiative (initiating leaderships)* dan keteladanan*.* Namun ditopang juga adanya integritas SDM *key stakeholders*, sehingga kolaborasi dapat berjalan dan berkembang. Kelima faktor penggerak ini dapat timbul sendiri maupun dalam waktu bersamaan mendorong proses *CGR*. Di dalam *CGR* ini terjadi dinamika kolaborasi yang saling berinteraksi mempengaruhi satu dengan yang lain, yaitu *principled engagement, shared motivation*, dan *capacity for joint action*. Ketiga faktor ini berinteraksi dalam dinamika yang menggerakkan kolaborasi diantara para aktor. Temuan baru pada komponen *shared motivation,* yakni munculnya elemen budaya organisasi institusi yang permisif bagi para aktor, sehingga dinamika kolaborasi dalam kerangka *CGR* lebih dapat berkembang. Selanjutnya, siklus kolaborasi ini menghasilkan aksi kolaborasi, aksi kolaborasi menghasilkan keluaran atau *outcomes*. Aksi kolaborasi bisa berbentuk hasil yang bersifat sementara *(intermediate outcomes),* keputusan, peraturan, regulasi dan berbagai kebijakan bersama yang dibuat secara konsensus, kesepakatan untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan bersama. Kebijakan bersama ini akhirnya akan menghasilkan keluaran atau *outcomes* yang berbentuk fisik, perbaikan lingkungan, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut, kolaborasi antar *stakeholder* pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi dimulai dari penggerakan prinsip bersama, motivasi bersamadan pembentukan kapasitas bersama sebagai komponen interaksi dari dinamika kolaborasi *(collaboration dynamics)*, serta dilanjutkan dengan melaksanakan aksi kolaborasi yang membentuk suatu model *collaborative governance*. Selanjutnya pendekatan model *collabotative governance* pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi yang selama ini terbangun menunjukkan sebagai bagian dimensi konteks sistem *(system context)* pada *collaborative governance* yang diawali dan bergerak secara *multilayers*, namun belum berjalan secara efektif dimana elemen-elemen dimaksud terdiri dari (1) kondisi pelayanan dan sumber daya, (2) kerangka legal dan kebijakan, (3) karakteristik sosio ekonomi dan kultural, (4) karakteristik jejaring, (5) dinamika politik dan kekuasaan, dan sejarah konflik, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya dimensi konteks sistem secara optimal, utamanya pada elemen kondisi pelayanan dan sumber daya, yakni ketersediaan sumber dana yang belum memadai dan mencukupi untuk pengelolaan dimaksud, kedua, pada elemen kerangka legal dan kebijakan, yakni belum adanya kerangka hukum atau peraturan yang memadahi secara administratif dan mengikat bagi semua sumber daya, sehingga para pihak sebatas menjalankan peran sesuai dengan misinya masing-masing. Selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup Kawasan Pinggir Kali Bekasi belum berjalan secara efektif. Namun, terdapat hal menarik yang menunjukkan, bahwa dinamika kolaborasi *(collaboration dynamics)* nampak bergerak terjadi atau setidaknya didukung oleh komponen *share motivation* atau modal sosial, terutama pada elemen *internal legimacy*, yakni adanyarasa saling memahami dan menghormati peran dan kondisi setiap personal, sehingga terbentuk rasa percaya *(interpersonal validation and cognitive legimacy)* untuk melakukan aksi kolaborasi. Setiap individu merasa bahwa partisipan dapat dipercaya dan kredibel sebagai rekan kerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afful-Koomson, Timothy, 2013*, Collaborative Governance and Its Relevance for Extractive Industries in Africa.* Dalam: Afful-Koomson, Timothy dan Asubonteng, Kwabena Owusu (Ed.). *Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa* (pp. 1-26). Accra: The United Nations University Institute for Natural Resources in Africa (UNU-INRA).

Agranoff, Robert and Michael McGuire, 2003, *Collborative Public Management: new strategies for local goverments*, Washington, D.C., Georgetown University Press.

Agranoff, Robert, 2012. *Collaborating to Manage: A Primer for the Public Sector.* Washington, D.C : Georgetown University Press.

Anggara, Sahya, 2015, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Ansell, Chris dan Alison Gash, 2007, *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access*, hlm 1-22, University of California: Berkeley

D.Ngar-yin dan P. Hill, 2010, *Collaborative Governance for sustainable Development: Wind ResourceAssesment in Xinjiang and Guandong Province*, China. Copyright @2010 John Wiley & Sons, Ltd ang ERP Environment.Wiley onlaine Library. hlm 89

Donahue, John D. and Richard J. Zeckhauser, 2011, Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals In Turbulent Time, New Jersey, Princeton University Press.

Dwiyanto, A., 2015, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Emmerson, K, Nabatchi, T dan Balogh, S., 2011, *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, Journal of Public Administration Research and Theory, 2011, Vol.22, hal.1-29.

Emmerson, Kirk and Nabatchi, Tina, 2015, *Collaborative Governance Regimes*, Washington, D.C., Georgetown University Press

Haris, Syamsuddin, 2007, (editor). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta

Hiplunudin, Agus, 2017, *Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik; Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta, Penerbit Calpulis

Imran, S., “Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (3) hlm 457-467, 2013

Irawan, Prasetya, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial,* Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta

Junus, D., 2010, Kemitraan pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, *Jurnal Legalitas*, 3 (2) hlm 134-146

Kartini, Kartono, 2013, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers.

Kurniadi dan Suryadi, Soleh (2021), *Collaborative Governance: Teori dan Implikasi*, Banyumas, CV. Pena Persada, Cetakan Pertama

*Kota Bekasi dalam Angka*, 2017, Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi

Maximini, Dominik, 2015, *The Scrum Culture: Introducing Agile Methods in Organizations*. Cham: Springer.

Mukti, Rido Argo & Saykha Sabila Araz, ”Model *Stakeholder Collaborative Governance* dalam Pengelolaan lingkungan Hidup Kampung Hijau Gambiran Umbulharjo Yogyakarta”

Nurmandi, A., 2014, *Manajemen Perkotaan*, Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government (JKSG UMY)

O’Flynn, Janine and John Wanna, 2008, *Collaborative Governance: A New Era Of Public Policy In Australia,* Canberra, Australia, University Printing Services, ANU Press

O’Leary, Rosemary and Lisa Blomgren Bingham, 2009, *The Collaborative Public Manager*, Washington , D.C., Georgetown University Press.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Gava Media

Sembiring, Masana, 2012, *Budaya dan Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintah)*, Bandung, Fokusmedia.

Sirianni, Carmen, 2009, *Investing in Democracy: Engaging Citizens In Collabotaive Governance*, The Brookings Institution, Washinngton, D.C.

Situmorang, W., (n.d), *Gerakan Sosial: Teori & Praktek*, Jakarta: Pustaka Pelajar

Suryadi, Soleh, 2019, *Administrasi Publik & Otonomi Daerah*, Prisma Press Prodaktama, Cetakan Ketiga, Bandung

Subarsono, AG, 2016, *Analisis* *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi,* Yogyakarta, Cet VI, Pustaka Pelajar.

Subarsono, AG, ed, 2016, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaborativf: Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta, Cet I, Penerbit Gava Media

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta CV, Bandung

Sullivan, Helen and Chris Skelcher, 2002, *Working Across Boundaries: Collaborative in Public Services,* New York, N.Y., Palgrave Macmillan

Suswanto, Edy**,** 2018,*Manajemen Kolaborasi Dalam Rangka Pengelolaan Situ Rawa Gede Berbasis Masyarakat Dan Berkelanjutan Di Kota Bekasi,* Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Vol.7 No.1 Juni 2018

Tasdyanto, 2010, *“Budaya Lingkungan Hidup Komunitas Kota Di Yogyakarta”*, *Jurnal EKOSAINS*, 2 (3) hlm 28-42.

Thoha, Miftah, 2015, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, Rajawali Pers.

Usman, Sanyoto, 2015, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial,* Yogyakarta, Purtaka Pelajar.

Utomo, W., 2008, *Administrasi Baru di Indonesia, Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Zaenuri, M., 2016, *“Ceramah”*, Tata Kelola Pariwisata Bencana dalam Perpektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi di Kabupaten Sleman, Seminar Hasil Penelitian Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY, 7 November 2016.